

Analisis Transparansi Penggunaan Apbd Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Sirup Lpse Kabupaten Karawang

Lila Setiyani^{a*}, Dudi Awalludin^b, Murni Kurniasih^c

^{a,b,c}STMIK ROSMA, Jl. Parahiyangan, Karawang 41311, Indonesia

^alila.setiyani@dosen.rosma.ac.id

Abstract

Transparency or openness in the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is expected by the community. In the Electronic Procurement (E-Procurement) process, SiRUP at the Karawang Regency Electronic Procurement Service (LPSE) is one way of delivering information that can be accessed by anyone. This research was conducted using Good Governance Theory. By conducting observation interviews and focus group discussions (FGD) on users of SiRUP LPSE Karawang Regency in presenting data on the General Procurement Plan (RUP) on the system. This research was conducted to find out how this system can present information transparently. By going through the stages of Data Analysis and Business Process Model and Notation (BPMN) it can be seen that the SiRUP Electronic Procurement System (E-Procurement) strongly supports the value of Good Governance and in terms of transparency in the use of APBD it has been implemented very well, it can be seen from the delivery process. information and the ease with which it can be accessed by the public.

Keywords : Electronic Procurement System (E-Procurement); Good Governance, APBD Transparency; Public Information

Abstrak

Transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan oleh masyarakat. Dalam proses pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE Kabupaten Karawang menjadi salah satu cara dalam penyampaian informasi yang bisa diakses oleh siapapun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Good Governance. Dengan melakukan Observasi wawancara dan focus group discussion (FGD) pada pengguna SiRUP LPSE Kabupaten Karawang dalam menyajikan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada sistem. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana sistem ini dapat menyajikan informasi secara transparan. Dengan melalui tahapan Analisis Data dan Penggambaran Business Process Model and Notation (BPMN) Dapat diketahui bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP sangat mendukung nilai Good Governance serta dalam hal transparansi penggunaan APBD sudah diterapkan dengan sangat baik, dapat dilihat dari proses penyampaian informasinya dan kemudahan yang bisa di akses oleh publik

Keywords : Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement); Good Governance; Transparansi APBD, Informasi Publik

1. Pendahuluan

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi pada saat ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) salah satunya Kabupaten Karawang ikut serta dalam peningkatan pelayanan publik, layanan ini adalah suatu sistem dengan berbagai macam aplikasi didalamnya dengan tujuan untuk menciptakan nilai-nilai *good governance* yang diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP). Permasalahan dalam pengadaan barang atau jasa yang sering ditemukan dari Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dampak atas ketidakterbukanya dalam proses pengadaan barang dan jasa sering ditemukan tindak kecurangan maupun penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam artian proses pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan tidak transparan dalam perencanaan pengadaan sehingga dapat berpotensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), selain itu tidak adanya informasi yang diberikan secara terbuka kepada masyarakat untuk dapat ikut mengawasi dalam penggunaan anggaran selain itu tidak adanya informasi yang diberikan secara terbuka kepada masyarakat untuk dapat ikut mengawasi dalam penggunaan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui *e-procurement* atau proses pengadaan barang atau jasa secara *online* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat (sutedi, 2016). Mengingat potensi pemanfaatannya teknologi dan informasi pada saat ini dapat membuka lebih luas mengenai peluang bagi penggunaan atau pengaksesan sistem, pengelolaan data dan informasi serta pendayagunaan data informasi tersebut secara cepat dan akurat. Dengan dibuatnya layanan ini sebagai sebuah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) SiRUP pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Suwandono et al. 2013) Kabupaten Karawang adalah aplikasi dari sebuah sistem berbasis *internet* atau *web* (*web based*) dimana dalam fungsi dan kegunaannya sebagai alat atau sarana dalam pembuatan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan memberikan informasi kepada publik secara baik dan terbuka. Serta dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) hal ini menjadi satu cara yang sangat efektif agar transparansi atau akuntabel dapat terjadi dalam proses pengadaan barang pada era reformasi saat ini, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas, pemerintahpun tengah berusaha agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas melalui kebijakan atau peraturan yang efektif, efisien, mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik dan atau kebebasan terhadap informasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi penggunaan APBD Kabupaten Karawang melalui analisis aplikasi SiRUP LPSE Kabupaten Karawang yang hasilnya dapat memberikan gambaran transparansi dari manajemen APBD di Kabupaten Karawang.

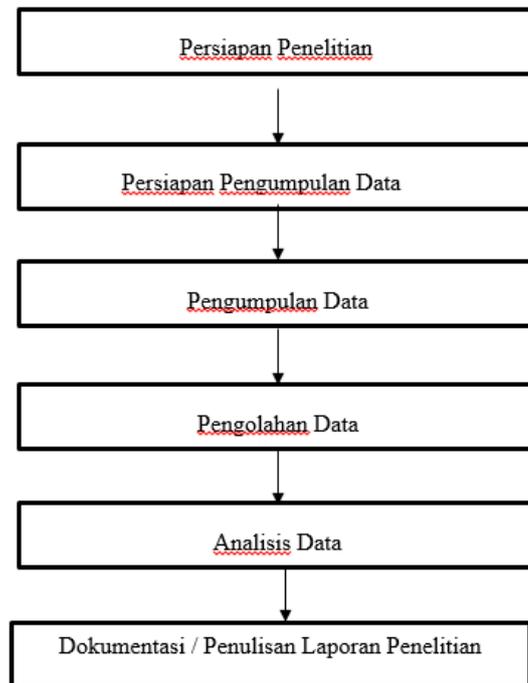
2. Tinjauan Pustaka

Good Governance dapat diartikan suatu pengelolaan tata pemerintahan yang baik serta bagaimana cara manajemen pembangunan yang sangat solid dalam artian sebagaimana seluruh aparaturnya mampu memberikan kerja sama yang baik dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Peneliti, 2022). Sementara itu mendefinisikan *good governance* (Riskha Chyntia Dewi and Suparno Suparno 2022) sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Renyowijoyo 2012). *Good governance* muncul dari berbagai tuntutan masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang prima, transparan, akuntabel, dan efisien. Pelaksanaan *good governance* harus dimulai dari jenjang pemerintahan lokal hingga jenjang pemerintahan nasional (Peneliti, 2022). Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran adalah Penyediaan informasi yang jelas, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap serta Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (Sapti, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) (Haryati, Anditya, and Wibowo 2011) SiRUP LPSE (Dewi SP and R 2018) Kabupaten Karawang apakah sistem tersebut dinilai sudah mampu selain dalam penggunaannya dimana dalam fungsi dan kegunaannya sebagai alat atau sarana dalam pembuatan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan memberikan informasi kepada

publik secara baik dan transparan. Menurut Kashi Nisjar (1997) dalam (Susi Natalia 2017) mengemukakan bahwa secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

3. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan mengukur, memberikan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan dalam penerapan prinsip transparansi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang, misalnya tanggapan efektif. terhadap pertanyaan yang diajukan kepada responden. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari transkrip wawancara, catatan, dokumen pribadi, memo, maupun dokumen resmi lainnya(Sugiyono 2020). Adapun tahapannya penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah staff yang terlibat dalam kegiatan pelayanan publik Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang. Pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling*(Arieska and Herdiani 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data Sekunder yaitu instrumen Wawancara dan *focus group discussion (FGD)*(Purnama 2015).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pengumpulan Data

Pada tahap Pengumpulan Data peneliti melakukan wawancara dan *focus group discussion (FGD)* yang sudah dijelaskan sebelumnya.

b. Pengolahan Data

Pada tahap data yang sudah di kumpulkan pada tahap sebelum nya menjadi Transkrip hasil wawancara dan *focus group discussion (FGD)* untuk diklasifikasikan data.

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	SUMBER DATA	REDUKSI DATA
1	Pengetahuan Umum	Apakah yang anda ketahui tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang?	Transkrip Wawancara Narasumber TS 14 Maret 2022	Sirup adalah aplikasi untuk melakukan pembuatan dan pengumuman rencana umum. Sirup disini adalah Salah satu Aplikasi dari sistem Pengadaan Secara Elektronik. Jadi bisa dikatakan sirup adalah salah satu contoh dari sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP pengadaan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah karena berbasis web sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional
			Transkrip Wawancara Narasumber RH 15 Maret 2022	SPSE adalah aplikasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sedangkan sirup adalah aplikasi untuk melakukan pembuatan dan pengumuman rencana umum pengadaan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
			Transkrip Wawancara Narasumber DK 16 Maret 2022	Salah satu Aplikasi dari sistem Pengadaan Secara Elektronik. Berbasis web sirup adalah salah satu contoh dari sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE sarana layanan publik terkait RUP yang bersifat nasional
			Transkrip Wawancara Narasumber TR 22 Maret 2022	Sirup adalah Salah satu Aplikasi dari sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis WEB dengan tujuan untuk melakukan pembuatan dan pengumuman rencana umum (RUP) pengadaan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Gambar 2. Ilustrasi dari Organisasi Data

c. Hasil Analisis Data

Setelah proses pengolahan data pada tahap sebelumnya, selanjutnya adalah tahap Analisis Data. Berikut adalah proses analisis data :

Reduksi Data

1) Organisasi Data

Hasil dari pengumpulan data wawancara dan *FDG* di transkrip kemudian di lakukan proses Organisasi data. Transkrip kemudian dapat dianalisis ditandai untuk memudahkan *coding* dan pengklasifikasian :

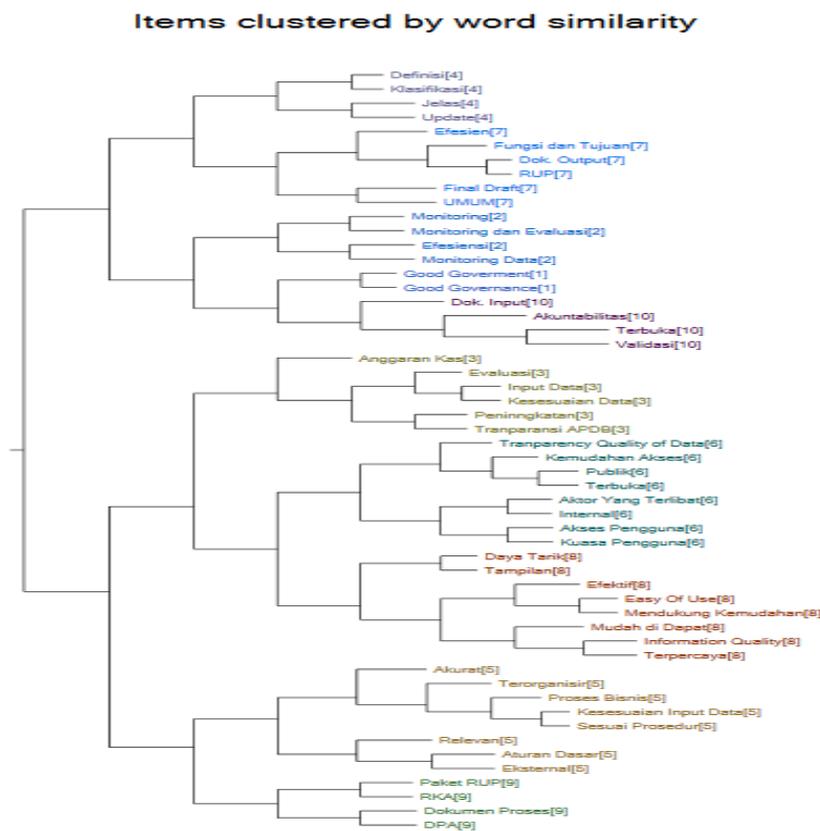
NO	VARIABEL	PERTANYAAN	SUMBER DATA	REDUKSI DATA
1	Pengetahuan Umum	Apakah yang anda ketahui tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang?	Transkrip Wawancara Narasumber TS 14 Maret 2022	Sirup adalah aplikasi untuk melakukan pembuatan dan pengumuman rencana umum. Sirup disini adalah Salah satu Aplikasi dari sistem Pengadaan Secara Elektronik. Jadi bisa dikatakan sirup adalah salah satu contoh dari sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP pengadaan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah karena berbasis web sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional
			Transkrip Wawancara Narasumber RH 15 Maret 2022	SPSE adalah aplikasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sedangkan sirup adalah aplikasi untuk melakukan pembuatan dan pengumuman rencana umum pengadaan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
			Transkrip Wawancara Narasumber DK 16 Maret 2022	Salah satu Aplikasi dari sistem Pengadaan Secara Elektronik. Berbasis web sirup adalah salah satu contoh dari sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE sarana layanan publik terkait RUP yang bersifat nasional
			Transkrip Wawancara Narasumber TR 22 Maret 2022	Sirup adalah Salah satu Aplikasi dari sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis WEB dengan tujuan untuk melakukan pembuatan dan pengumuman rencana umum (RUP) pengadaan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Gambar 3. Ilustrasi dari Coding Data

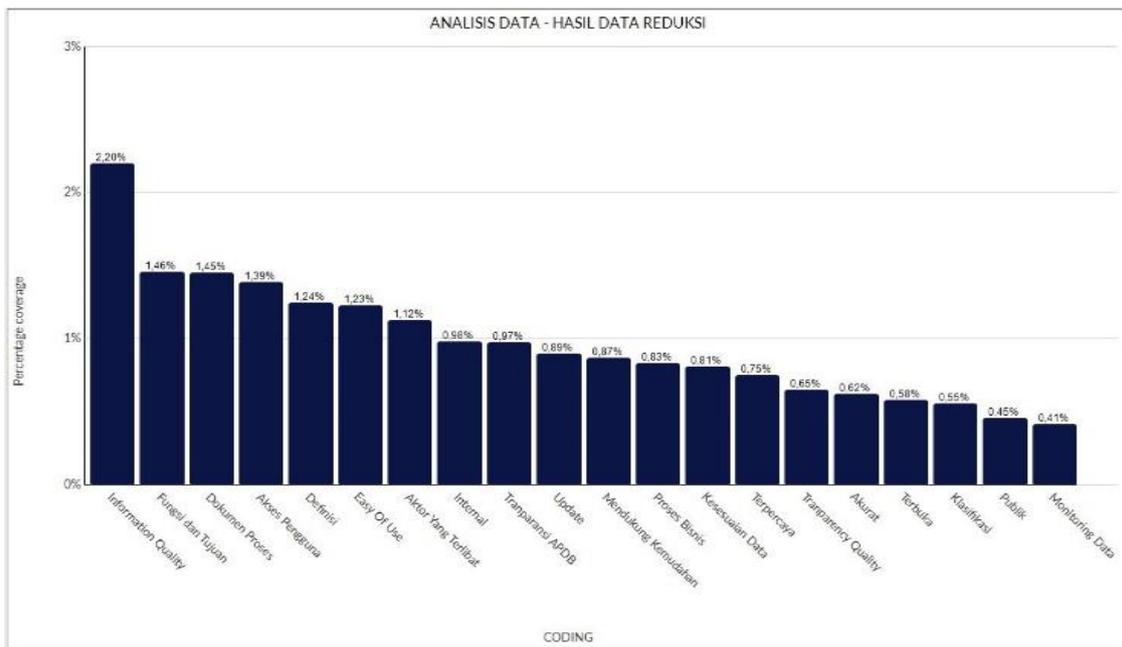
2) Coding Data

Setelah data diorganisasi, kemudian dikelompokkan ke dalam tema tertentu dan diberi kode untuk melihat kesamaan pola temuan. Berdasarkan hasil analisis dan pengkodean data yang telah

dilakukan sebelumnya yang juga dilihat dari jawaban partisipan terhadap tema pada tahap wawancara dan *FDG* hasil diatas dapat diketahui pada gambar dibawah ini :



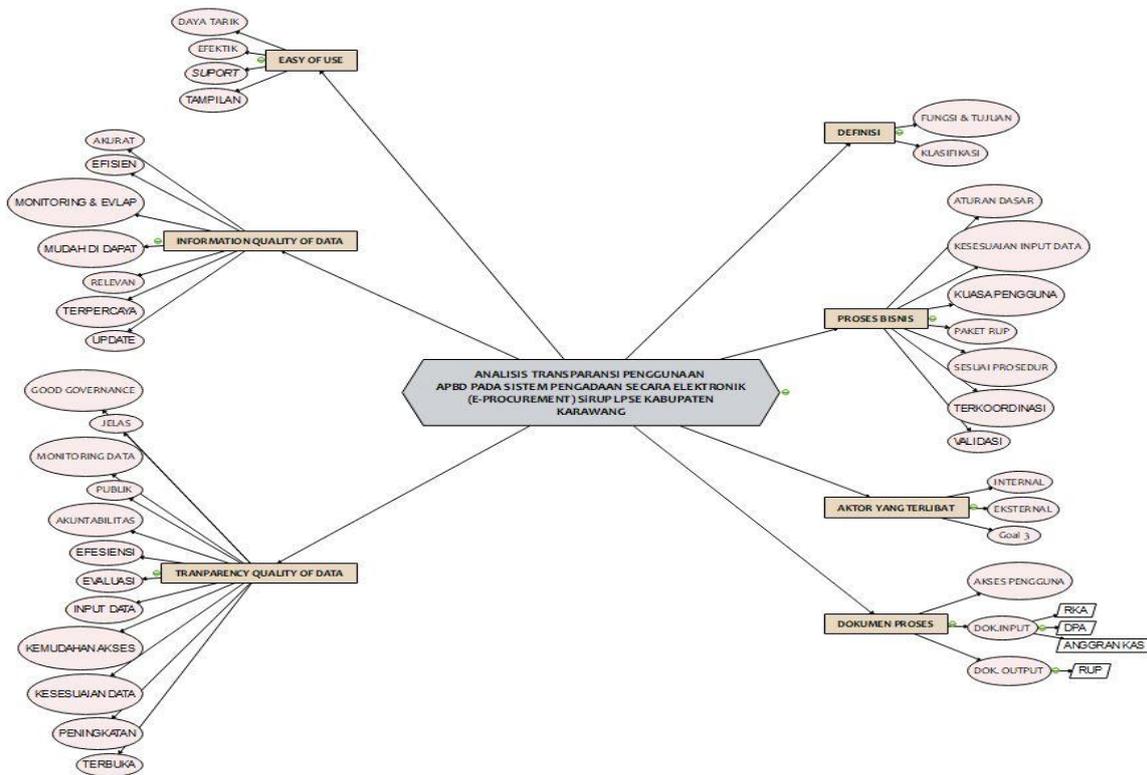
Gambar 4. Hasil Reduksi Data



Gambar 5. Hasil Reduksi Data – Diagram Batang

d. *Display Data*

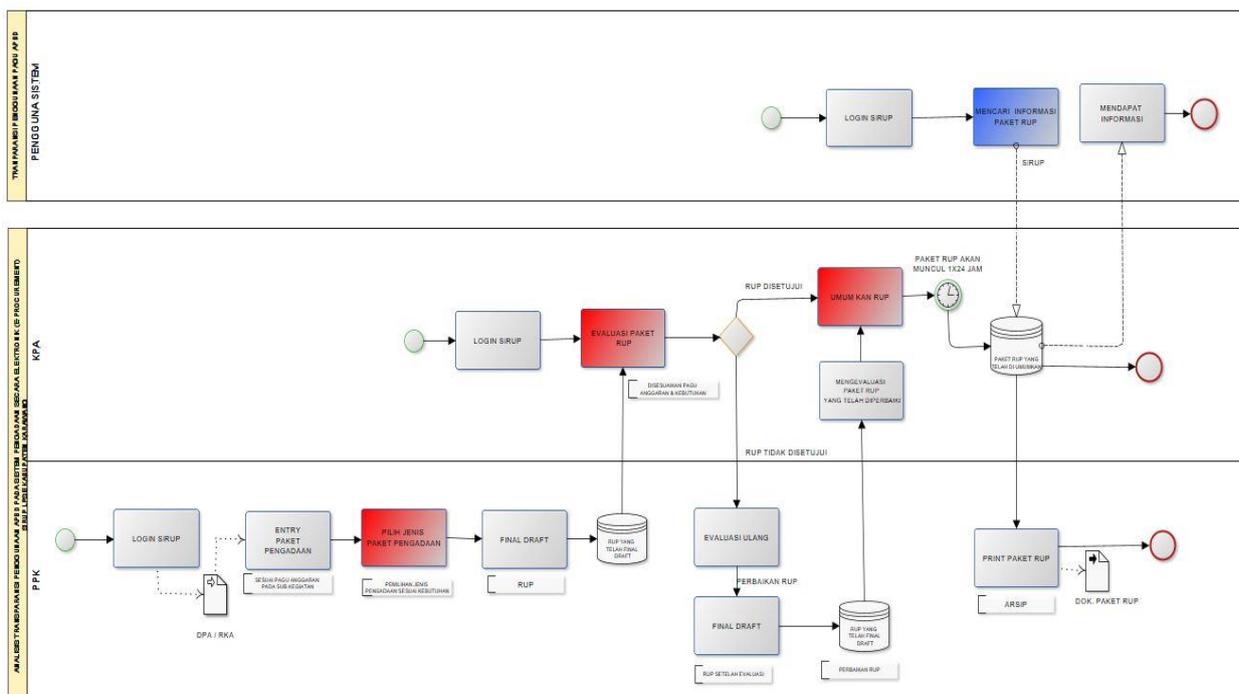
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Berikut peneliti menampilkan hasil penelitian dalam *display data* bentuk bagan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 6. Display Data

e. Hasil Analisis Proses Bisnis

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat diketahui proses dapat diketahui bahwa tranparansi Penggunaan Pagu APBD pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang. Proses bisnis berjalan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 7. Bisnis Proses Analisis Analisis Transparansi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Transparansi Penggunaan APBD Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang, maka dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP LPSE sangat mendukung nilai Good Governance pada pemerintahan Indonesia khususnya LPSE Kabupaten Karawang. Pada Penggunaan Pagu Anggaran dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP LPSE Kabupaten Karawang dalam hal transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan Pagu Anggaran APBD, sudah diterapkan dengan sangat baik, dapat dilihat dari penyampaian informasi pada layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Transparansi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Karawang baik fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban instansi atau dinas telah berjalan baik. Pada prinsip yang digunakan sudah taat pada peraturan perundang-undangan, LPSE Kabupaten Karawang memberikan informasi publik penggunaan anggaran kepada masyarakat dalam bentuk dokumen yang mudah didapat dengan informasi yang akurat dan terpercaya dengan cara memberi akses pada masyarakat, kemudian LPSE Kabupaten Karawang bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna sistem. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh good governance dalam hal Transparansi Penggunaan APBD Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) SiRUP LPSE Kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang.

References

- Arieska, Permadina Kanah, and Novera Herdiani. 2018. "Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif." *Jurnal Statistika* 6(2): 166–71.
- Dewi SP, Ani Tresna Kencana, and Ibrahim R. 2018. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa." *Journal Ilmu Hukum* 6(5): 1–12.
- Haryati, Dwi, Anugrah Anditya, and Richo Andi Wibowo. 2011. "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta *." *Mimbar Hukum* 23(2): 237–429.
- Purnama, Sang Gede. 2015. "Panduan Focus Group Discussion (FGD) Dan Penerapannya." *Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana*: 1–15.
- Renyowijoyo, Muindro. 2012. Jakarta: Salemba Empat. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*.
- Riska Chyntia Dewi, and Suparno Suparno. 2022. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7(1): 78–90.
- Sugiyono, (2020 :9). 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Bandung." *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung*.
- Susi Natalia. 2017. "Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Akta Jual Beli Tanah Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2(2).
- Suwandono, Agus et al. 2013. *The Role of Educators & Students in Building Integrity*.